

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KELURAHAN MANGGONG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	2
PENDAHULUAN	2
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
BAB II	5
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD	5
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
BAB III	6
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD	6
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD	7
BAB IV	8
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	8
BAB V	9
PENUTUP	9

BAB I PENDAHULUAN

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Kelurahan Manggong sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam merealisasikan potensi belanja-LRA alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Adapun alasan dan kondisi yang menyebabkan melakukan perubahan anggaran tersebut, serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, akan dijelaskan pada subbab berikutnya yaitu hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dengan format Permendagri 13 Tahun 2006 sebagaimana Tabel II.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Perubahan APBD Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

Tahun Anggaran 2023

Kode	Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
'701000000 1001		Kelurahan Manggong	460.761.000,-	735.759.380,-
7010000001 001	5	BELANJA DAERAH	460.761.000,-	735.759.380,-
7010000001 001	51	BELANJA OPERASI	460.761.000,-	735.759.380,-
7.01..01.2.0 6.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	103.023.600,-	103.023.600,-
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat daerah	22.379.600,-	22.379.6000,-
7.01.01.2.08 00.10.0001	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.944.500,-	68.944.500,
7.01.01.2.09	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	11.699.500,-	11.699.500,-

		Pemerintahan Daerah		
7.01.03	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KLELURAHAN	357.737.400,-	632.735.780,-
7.01.03.2.02	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	357.737.400,-	632.735.780,-

Adapun ikhtisar pencapaian target keuangan yang merupakan perbandingan secara garis besar antara target sebagaimana tertuang dalam APBD dengan realisasinya, ditampilkan dalam Tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan	Realisasi 2023	%
	Kelurahan Manggong	735.759.380,-	663.140.402,-	90,13
7	BELANJA DAERAH	735.759.380,-	663.140.402,-	90,13
7.01	BELANJA OPERASI	735.759.380,-	663.140.402,-	90,13
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	103.023.600,-	90.948.102,-	88,28
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.379.600,-	17.057.500,-	76,22
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.595.000,-	3.595.000,-	100,00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.798.000,-	6.365.000,-	93,63
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.086.600,-	3.305.000,-	64,97
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.900.000,-	3.792.500,-	54,96
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.944.500,-	63.335.390,-	91,86
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.790.000,-	4.270.000,-	89,14
7.01.01.02.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.080.000,-	4.691.520,-	66,26
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.074.500,-	54.373.870,-	95,27

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.699.500,-	10.555.212,-	90,22
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.300.000,-	2.699.712,-	81,81
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.951.500,-	4.951.500,-	100,00
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.448.000,-	2.904.000,-	84,22
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	632.735.780,-	572.192.300,-	90,43
7.01.03.2.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	632.735.780,-	572.192.300,-	90,43
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	416.997.780,-	408.982.300,-	98,08
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	215.738.000,-	163.210.000,-	75,65

Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Di Dalam pencapaian target kegiatan, tentunya ada beberapa faktor yang menghambat, yang menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengambilan UP atau GU yang sering Terlambat dikarenakan kadang Kecamatan Sudah habis Kelurahan Belum kadang Kelurahan sudah habis Kecamatan Belum
2. Adanya kegiatan yang seharusnya diambil pakai LS banyak kegiatan yang mamakai GU sehingga bayak kegiatan yang tidak maksiman atau tidak terkafer .
3. Adanya kegiatan yang kurang anggaran;
4. Sehingga Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan kegiatan penunjang yang kurang

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD
3.1.1. Pendapatan - LRA

Kelurahan Manggong tidak mengelola pendapatan baik Pendapatan Asli Daerah maupun Hasil Retribusi Daerah, seperti terlihat dalam tabel berikut:

PENDAPATAN TAHUN 2023

	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0
Hasil Retribusi Daerah	0	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0	0

Realisasi Pendapatan Kelurahan Manggong Selama Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 0.

3.1.2. Belanja

Realisasi APBD Tahun 2023 bagi Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo sesuai Penjabaran APBD Perubahan Tahun 2023 Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara lengkap sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Realisasi APBD Tahun 2023

Kantor Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo

JENIS BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
1. Belanja Tidak langsung a. Belanja Pegawai	00,-	00,-	00,-
2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai	735.759.380,00	663.140.402,00	90,13 100,00

b. Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	90,09
c. BIJ Persediaan Dijual /diserahkan Masyarakat	732.959.380,00	660.340.402,00	0,00
d. Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	735.759.380,00	663.140.402,00	90,13
Surplus (Defisit)	(735.759.380,00)	(663.140.402,00)	

Sumber : Laporan Realisasi Keuangan Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023

Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023 Kantor Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo, untuk belanja tidak langsung ikut Kantor Kecamatan Ngadirejo sehingga terealisasi sebesar Rp. 0,00 atau 0 % dari anggaran sebesar Rp. 0,00.

Belanja Kelurahan Manggong meliputi belanja operasi dengan realisasi sebesar Rp 663.140.402,00 atau sebesar 90 % dari anggaran sebesar Rp. 735.759.380,00

a. Pelaksanaan APBD Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Kantor Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo mendapatkan Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 735.759.380,00, namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 663.140.402,00 atau (90 %), sehingga terdapat selisih sebanyak Rp. – 72.618.978,00 (90 %)

b. Belanja Persediaan untuk Dijual/ Diserahkan kepada Masyarakat

Belanja Persediaan untuk dijual /Diserahkan Masyarakat Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 tidak ada

Tabel 3.2

**Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Masyarakat Kelurahan
Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023**

Belanja Persediaan/diserahkan Masyarakat	2023	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Kelurahan Manggong	0,00	0,00
	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

Realisasi Belanja Persediaan Dijual /Diserahkan Masyarakat TA 2023 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dari anggaran sebesar Rp. 0,00

Tabel 3.3

c. Belanja Modal

Belanja Modal Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2023

Belanja Modal	2023	
	Anggaran	Realisasi
	0,00	0,00
Jumlah :	0,00	0,00

3.1.3. Pendapatan - LO

Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo tidak mempunyai pendapatan yang merupakan lain-lain pendapatan yang sah

3.1.4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Pada tahun anggaran 2023, Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo mempunyai beban operasi sebesar Rp. 767.718.491,16 yang terdiri dari :

1. Beban Operasi sebesar 663.623.282,00 yang terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp 2.800.000,00 dan Beban Barang dan Jasa sebesar Rp 660.888.822,00
2. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 104.029.669,16 yang terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9.324.719,29 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp74.245.833,20 dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp 20.459.121,67

Tabel. 3.4
Beban Operasi dan Beban Penyusutan Amortisasi

No	Uraian	2023	2022
		Rp	Rp
1	Beban Operasi	767.718.491,16	798.442.186,57
	Beban Pegawai	2.800.000,00	3.075.000,00
	Beban Barang dan Jasa	660.888.822,00	706.531.286,00
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	104.029.669,16	88.835.900,57
	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	9.324.714,29	14.944.8785,70
	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.245.833,20	63.402.143,20
	Beban Penyusutan Jalan dan jaringan irigasi	20.459.121,67,0 0	10.488.971,67
	JUMLAH	767.718.491,16	798.442.186,57

Adapun Rincian Beban Daerah pada Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

1. Beban Pegawai sebesar Rp 2.800.000,00

Tabel. 3.5
Beban Pegawai TA. 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Beban Pegawai	2.800.000,00	
	Jumlah	2.800.000,00	

Belanja Beban pegawai untuk Belanja Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp. 2.800.000,-

2. Beban Barang dan Jasa sebesar 660.888.822,00

Tabel. 3.6
Beban Barang dan Jasa TA. 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Barang	317.574.512,00	
2	Beban Jasa	334.670.310,00	
3	Beban Pemeliharaan	3.594.000,00	
4	Beban Perjalanan Dinas	5.050.000,00	
	JUMLAH	660.888.822,00	

Beban Barang dan Jasa TA 2023 sebesar 660.888.822,00 1 Beban Barang 317.574.512,00 , 2. Beban Jasa sebesar Rp.334.670.310 ,00 3. Beban Pemeliharaan sebesar Rp 3.594.000,00 4. Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp 5.050.000,00 Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 secara umum mengalami Penurunan secara signifikan dibandingkan dengan Tahun 2022

3. Beban Barang Persediaan untuk / diserahkan Kepada Masyarakat sebesar : 0,00

Tabel. 3.7

Beban Persediaan untuk Dijual / Diserahkan Kepada Masyarakat TA.2023

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar 104.029.669,16

Tabel. 3.8

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Sebesar : 9.324.714

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Penyusutan alat Besar	2.710.714,29	

2	Beban Penyusutan alat Angkut	0,00	
3	Beban Penyusutan alat Pertanian	0,00	
4	Beban Penyusutan alat Kantor dan Rumah Tangga	4.114.000,00	
5	Beban Penyusutan alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	
6	Beban Penyusutan alat Penyusutan Komputer	2.500.000,00	
	Jum	9.324.714.29	

Tabel. 3.9

b.Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Sebesar: 74.245.833,20

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Penyusutan bangunan Gedung	74.245.833,20	
	JUMLAH	74.245.833,20	

Tabel. 3.10

b.Beban Penyusutan Jalan ,Jaringan dan Irigasi Sebesar:20.459.121,00

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	19.940.300,00	
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	453.875,00	
3	Beban Penyusutan Instalasi	64.946,67	
	JUMLAH	20.459.121,00	

3.1.5. Aset
1. Kas dan Setara Kas

Tabel.3.11
Kas dan Setera Kas TA. 2023

Kas dan Setara Kas	2022	2023
	Rp.	Rp.
a. Kas di Kas Daerah	'0	'0
b. Kas di Bendahara Pengeluaran	'0	'0
c. Kas di Bendahara Penerimaan	'0	'0
d. Investasi Jangka Pendek	'0	'0
Jumlah Kas dan Setara Kas	'0	'0

a. Kas di Kas Bendahara Pengeluaran 0

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.00, Tidak ada sisa TU Kerana tidak ada pengajuan TU. dengan rincian sebagai berikut

Tabel. 3.12
Kas di Bendahara TA. 2023

Kas di Bendahara Pengeluaran yang merupakan sisa UP/GU/TU:	2022	2023
	Rp.	Rp.
1. Sisa GU	'0,-	'0,-
2. Sisa TU	'0,-	0,-
3. Sisa LS	'0,-	'0,-
Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran	'0,-	'0,-

2. Piutang :

3.Persediaan :

Akun ini menjelaskan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat pakai habis dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih di Satuan Kerja, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 Alat Tulis Kantor Materai Kertas dan Cover sebesar Rp. 295.000,00

Tabel. 3.13
Persediaan Habis Pakai TA. 2023

No	Uraian barang	Per Tanggal	Jumlah Sisa	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1	ATK					
	Busines File	0	0	Buah	0,-	0,-
	Stop Map Kertas	0	0	Buah	0	0,-
2	Kertas dan Kover	31/12/2023	5	Buah	59.000	295.000,-
3	Materai	0	0	Lembar	0,-	0,-
JUMLAH						295.000,-

4. Investasi jangka Panjang

5. Aset tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.094.550.459,32 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp 5.094.409.459,32 dengan rincian yang disajikan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.14
Aset Tetap Kelurahan Manggong Tahun 2023

Aset Tetap	2023	2022
	(Rp).	(Rp).
a. Tanah	2.510.300.000,00	2.837.800.000,00
b. Peralatan dan Mesin	204.982.000,00	204.982.000,00

c. Bangunan	3.712.291.660,00	3.170.107.160,00
d. Jalan , Jaringan dan Instalasi & Jalan dan Jembatan	219.506.400,00	219.506.400,00
e. aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
f. Akumulasi Penyusutan	(1.474.841.839,84)	(1.338.281.100,68)
g. Aset Lainnya	0,00	0,00

Mutasi aset tetap dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp ,78.123.760,84 (5.172.533.220,16 - 5.094.409.459,32) dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini

Tabel.3.15
Rekap Mutasi Aset Tetap Kel Manggong Kecamatan Ngadirejo
Temanggung Tahun 2023

Mutasi Aset Tetap Selama Tahun 2023				
Aset Tetap	Aset Tetap	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5
Tanah	2.837.800.000,00	0,-	327.500.000,-	2.510.300.000,00
Peralatan & Mesin	204.982.000,00	0,-	0-	204.482.000,00
Gedung & Bangunan	3.170.107.160,00-	542.184.500,-	0,-	3.712.291.660,00
Jalan, Irigasi & Jar.	219.506.400,00-	,00-	0,00-	219.506.400,00
Aset Tetap Lainnya	0,00-	0,-	0,00-	0,00-
Aset Lainnya	0,00-	00	0,00-	0,00
Jumlah Aset Tetap	5.094.550.459,32	0,-	0,00-	5.172.533.220,16

Kelurahan Manggong pada tahun 2023 Terdapat penghapusan / Pengurangan Tanah dan juga ada penambahan Gedung dan bangunan pengurangan serta ada penambahan.

A. Tanah

Dalam rangka penyusunan neraca awal, Aset Tetap Tanah dinilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tanggal neraca awal. Sedangkan mutasi setelah neraca awal, dinilai dan dicatat sebesar belanja modal sesuai dengan afektasi dalam SPM serta biaya operasionalnya. Berdasarkan rekap mutasi selama Tahun 2023, Aset Tetap Tanah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Aset Tetap-Tanah Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Kabupaten
Temanggung Per 31 Desember 2023

Akun	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
1	2	3	4	5
Tanah	2.837.800.000,-	0,-	327.500.000,-	2.510.300.000,00,-

Terdapat mutasi aset Tanah Pemda pada tahun 2023 ini. sebesar Rp.327.500.000,- pindah ke DPRKPLH Kab Temanggung.

B. Peralatan dan Mesin

Penilaian atas Peralatan dan Mesin dalam rangka penyusunan neraca awal, didasarkan pada Nilai Perolehan/ Pembelian. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 204.982.000,00 dan sebesar Rp 204.982.000,00 Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp 204.982.000,00. Tidak Terdapat pengurangan karena Reklasifikasi aset ke Barangang Ektrakontabel sebesar Rp.0,00

C. Gedung dan Bangunan

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset gedung dan bangunan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.170.107.160,00 per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 3.712.291.660,00. terdapat Penambahan Gedung Balai RW III yang belum tercatat sebesar Rp.542.184.500,00

D. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset jalan ,Irigasi dan Jaringan didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca awal. Saldo

aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sejumlah Rp.219.506.400,00 dan Rp.219.506.400,00 adanya Tidak ada Penambahan Jalan dan Jembatan dari belanja modal Tahun 2023 sebesar Rp. 0,00

E. Aset Tetap Lainnya

Dalam rangka penyusunan neraca awal, penilaian atas aset tetap lainnya didasarkan pada Nilai perolehan/pembelian pada tanggal neraca

awal. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00,- dan Rp 0,00,-

F. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi penyusutan (A.P) merupakan Penyusutan dari masing aset tetap, berdasarkan ini akuntansi dan standart penyusutan. Nilai A.P per 31 Desember 2023 adalah sebesar (1.338.281.100,68) Nilai A.P per 31 Desember 2022 adalah sebesar (1.338.281.100,68)

Tabel 3.17

No	Uraian	2022	2023
1	Akumulasi Penyustan peralatan Mesin	(184.169.785,70)	(193.494.499,99)
2	Akumulasi Penyustan Gedung dan bangunan	(1.140.638.930,80)	(1.247.415.834,40)
3	Akumulasi Penyustan Jalan ,Jaringan dan Irigasi	(13.472.384,18)	(33.931.505,85)
		(1.338.281.100,68)	(1.474.841.839,84)

AL .Aset Lainnya

Saldo per 31 Desember 2022 Rp.0,00 dan Per 31 Desember 2023 , 0,00 Terdapat penghapusan Software Rp.0,00

3.1.6. Kewajiban

Akun ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang meliputi Utang PFK, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Lain-lain kewajiban jangka pendek. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 4.121.420,00 dan Rp 4.528.840,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut: Tabel 3.16. Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022 .

Tabel 3.18
Kewajiban Jangka Pendek TA 2023 dan 2022

No	Kewajiban Jangka Pendek	2022	2023
1	2	3	4
1	Utang Piutang Pihak ke tiga (PFK)	0,00	0,00
	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
	Utang Pajak Daerah catering	0,00	0,00
No	Kewajiban Jangka Pendek	2022	2023
1	Utang belanja	4.121.420,00	4.528.840,00
	Utang Belanja Pegawai	0,00	0,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.121.420,00	4.528.840,00

3.1.7. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih organisasi pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih. Saldo per 31 Desember 2022 dan 2023 dapat dirinci sebagai berikut dapat dijelaskan bahwa jumlah ekuitas awal sebesar Tahun 2022 Rp. 5.090.429.039,32 selama TA. 2023 terdapat perubahan Beban operasi sebesar Rp. 5.168.004.380,16, sehingga Ekuitas Daerah untuk dikonsolidasikan menjadi sebesar Rp. 613.849.170,00. Ekuitas akhirnya menjadi sebesar Rp. 5.168.004.380,16

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

	Uraian	Anggaran	LRA	LO	Persediaan	Utang Belanja
BELANJA OPERASI						
	Belanja Pegawai	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00		
	Belanja barang dan Jasa	660.888.822,00	660.888.822,00	660.888.822,00	295.000,00	4.528.840,00
BELANJA MODAL						
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	'0,00	0,00	'0,00	'0,00	'0,00

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Dalam pelaksanaan entitas pelaporan keuangan, Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo berdomisili di Jalan Raya Ngadirejo Telp (0293) 591220 56255 Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Penjelasan Ringkas Sifat Operasi Entitas/Kegiatan Pokok Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021.
3. Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo

Struktur Organisasi SKPD Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo adalah sebagai berikut:

Lurah Manggong	: SRI RAHAYU.S.Sos.
Sekertaris Kelurahan	: HERI ARDIYANTO.S.AP..
Staf Bendahara Pembantu	: R O K H I M
Staf Pembantu Pengurus Barang	: SUPAJAR
Staf Pembantu Kepegawaian	: RIJADI
Staf Pengelola sarana Prasarana Kantor	: ESMA HADIYANTO
Staf Administrasi Umum	: MUSTAMADJI SETO. P Y
Staf Tenaga IT	: HERU PRASETYO
Staf Tenaga Kebersihan	: SUBEJO

4. Pemerintahan

Di Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo terdapat 3 RW / Lingkungan dan 30 RT dengan rincian sebagai berikut:

- 1.Lingkungan Gondang Duwur RW I Terdiri 13 Rt
- 2.Lingkungan Gondang Ngisor RW I Terdiri 10 Rt
- 3.Lingkungan Manggong RW I Terdiri 7 Rt

5. Letak Geografis

Desa Kelurahan Manggong yang terletak di ketinggian 600 m dari permukaan laut dan berjarak 1 km dari ibu kota kecamatan Ngadirejo 19 km dari ibu kota Kabupaten. Dengan luas 67 ha yang terbagi dalam lahan sawah 47 ha dan lahan bukan sawah 20 ha. Dari Lahan sawah bukan sawah dipergunakan untuk Bangunan/pekarangan. Desa Manggong terdapat 3 dusun yang terdiri dari 3 Rukun warga (RW) dan 30 Rukun tetangga (RT) dan terdapat 1.600 Rumah tangga. Jumlah penduduk 4.780 jiwa terdiri dari 2.371 jiwa Laki-laki dan 2.409 jiwa Perempuan. Penduduk usia 10 tahun keatas bermatapencaharian Petani tanaman pangan, Peternak, Petani Perkebunan, Pertambangan/Penggalian, Industri Pengolahan, Bangunan, Pedagangan, Hotel & Rumah Makan, Pengangkutan & Komunikasi, Bank&Lembaga Keuangan Laninnya, Jasa-jasa dan lainnya. Untuk sumber air minum berasal dari Leding/PAM, Sumur dan Mata air. Dan untuk penerangan 1.425 menggunakan PLN dan - rumah tangga menggunakan penerangan lain non PLN

BAB V PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan oleh Entitas Pelaporan, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi yang ada di Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung.
2. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan yang mengungkapkan gambaran umum tentang kinerja keuangan dalam merealisasikan potensi pendapatan dan alokasi belanja yang telah ditetapkan dalam APBD.
3. Dasar penyajian Laporan Keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.
4. Penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan.

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam Bab I sampai dengan Bab VII sebagaimana tersebut di atas diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada para pengguna/pemakai laporan keuangan pemerintah daerah yang meliputi masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah. Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disajikan dalam rangka memenuhi kewajiban atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD.


ZULFAH MANGGONG
(SR FIAHAYU.S.Sos...)
NIP. 19660608 198607 2 001